



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENJA RENCANA KERJA 2025

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

jogja
istimewa



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818
Website: www.binamentals.jogjaprovo.go.id Email: birobinamentals@jogjaprovo.go.id 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 00.9.2/1734

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan sasaran program perlu di jabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;

b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Lembaran...

(lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi dokumen acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- KETIGA : Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 Juli 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DIY,


Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 196602081997101001



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Telp. (0274) 562811 Faks. (0274) 521818
Website: www.binamentals.jogjaprov.go.id Email:
birobinamentals@jogjaprov.go.id 55213

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 00.9.2/1733

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

TAHUN 2025

**KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan sasaran program perlu di jabarkan melalui Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah...

Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025;
 2. Menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025;
 3. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Biro Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DIY,



Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP 196602081997101001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 00.9.2/1733
TANGGAL 11 Juli 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. SUKAMTO, S.H., M.H. 196602081997101001	Plt. Kepala Biro Bina Mental Spiritual	Penanggungjawab
2.	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. 196705021994031008	Plt. Kepala Bagian Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Ketua
3.	R. RAHMAN A. FANDARU S.Sos., M.P.A. 198009272011011003	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
4.	SRI ARDININGSIH, S.H. 196810011996032002	Analisis Kebijakan Madya	Anggota
5.	LUSINA SIWI LASTRININGSIH, S.K.M., M.Kes. 197006291996022001	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	MUNSIF SAHIRUL ALIM, S.Si., M.Si., M.Eng. 196910241998031005	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7.	AHMAD HANIF, S.IP., M.P.A 198105092010011014	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	TRI RUDATI,S.Pd., M.M. 196909082007012009	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9.	SUSILOWATI MYRRA DEWI, S.I.P. 199505092020122022	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
10.	FUTY DIEN PAMUNGKAS, A.Md.Ak 199805102020122005	Pengadministrasi Keuangan	Anggota

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DIY,


Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 196602081997101001

Formulir E. 29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Renja Biro Bina Mental Spiritual

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja - Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	V			
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	V			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	V			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	V			

Yogyakarta, 12 Juli 2024
PIR KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SETDA DIY,

Dr. SUKANTO, S.H., M.H.
NIP. 196602081997101001



KATA PENGANTAR

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan biro baru yang terbentuk dari gabungan Biro Bina Mental Spiritual dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat. Dibentuknya biro baru tersebut merupakan tindaklanjut dari Perdais Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 berpedoman pada rencana strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2022-2027. Rencana Kerja dan Rencana Strategis tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 berisi program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif tahun 2025, serta prakiraan maju pagu indikatif tahun 2026. Program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat meliputi tema dan isu strategis yang berkaitan dengan bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar. Tersusunnya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Yogyakarta, 2 Desember 2024

Plt. KEPALA BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Dr. SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP196602081997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1	PENDAHULUAN 1-1
1.1	Latar Belakang..... 1-1
1.2	Landasan Hukum..... 1-2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 1-4
1.4	Sistematika Penulisan 1-4
BAB 2	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2-1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 2-1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 2-15
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-17
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 2-20
BAB 3	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 3-1
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-2
3.3	Program dan Kegiatan 3-4
BAB 4	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1
BAB 5	PENUTUP..... 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	2-1
Tabel 2. 2 Realisasi Anggaran TA. 2024	2-5
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	2-7
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual.....	2-17
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-20
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2025	2-28
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	3-3
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3-4
Tabel 4.1 Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	4-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menurut Henry Fayol merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut, perencanaan merupakan langkah awal yang perlu disiapkan dalam upaya mencapai tujuan dengan cara penetapan strategi yang efektif agar dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Kerja tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2022-2027 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif yang meliputi tema dan isu strategis yang berkaitan dengan bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia. Adanya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program serta menjamin konsistensi perencanaan yang berkesinambungan dan bersinergi dengan mitra lintas sektor lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY;
2. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penyusunan Renja Biro Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025.

2. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY.

3. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja serta Program dan Kegiatan.

4. Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5. Bab V : Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Biro Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY Tahun 2025.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan maka perlu dilaksanakan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Capaian kinerja sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2023	TAHUN 2024				TAR GET AKHIR RPJMD/ REN STRA
						TARG ET	REA LI SASI	PERS EN TASE	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tujuan: Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	<u>Indikator:</u> Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kebijakan yang mendukung program pemda di tahun bersangkutan terhadap total program pemda yang akan didukung di akhir periode.	%	n/a	n/a	40	42,85	107	Sangat baik.	100

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SA TU AN	BA SE LI NE 20 22	REALI SASI 2023	TAHUN 2024				TAR GET AKHIR RPJMD/ REN STRA
						TARG ET	REA LI SASI	PERS EN TASE	KRITE RIA/ KO DE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sasaran 1: Meningkat nya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkat nya fasilitas kehidupan beragama	<u>Indikator:</u> Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> Komposit rumusan bahan kebijakan yang menjadi draf kebijakan serta fasilitasi keagamaan	%	n/a	n/a (per bedaa n indika tor kare na me ngacu RPD)	67,5	160	237	Sa ngat Baik	100
2	Sasaran 2: Meningkat nya tata kelola penyelenggar aan urusan pemerinta han di perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta</u> <u>Indikator:</u> Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	kate gori	A	A	A (88. 18)	92,07	104, 41	Sa ngat Baik	A (88,21)

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2024 berdasarkan indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik karena melampaui target yang telah direncanakan.

Pada indikator tujuan tahun 2024 terdapat tujuh program pemda yang terdiri dari:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum);
3. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum;
4. Angka Harapan Hidup (AHH);
5. Prevalensi Stunting;
6. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak;
7. Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)

Lima kebijakan yang dihasilkan Biro Bina Mental Spiritual telah mendukung 3 Program Pemda dari 7 Program Pemda yang ada, meliputi:

1. Surat Edaran Gubernur DIY terkait Sinkronisasi Pergub No 92 Tahun 2020 tentang RAD Stunting dengan RAN PASTI (mendukung Program Pemda terkait prevalensi stunting)
2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 400.7.10 / 2697 tentang Penguatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (mendukung Program Pemda terkait Angka Harapan Hidup)
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2024 tentang RAD Kesehatan Jiwa (mendukung Program Pemda terkait Angka Harapan Hidup)
4. *Policy Note* Pengembangan SMA Negeri 1 Seyegan sebagai Sekolah Berbasis Sains, Budaya, dan Olahraga (mendukung Program Pemda terkait Harapan Lama Sekolah (HLS))
5. *Policy Note* Studi Kelayakan Pendirian SMA Berbah (mendukung Program Pemda terkait Harapan Lama Sekolah (HLS)).

Adapun naskah bahan kebijakan yang dihasilkan sebanyak 11 dokumen yang mendukung capaian sasaran, diantaranya adalah:

1. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 109/KEP/2024 tentang Penetapan Petugas Haji Daerah DIY Tahun 2024
2. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 2/SE/111/2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah di DIY
3. Surat Edaran Gubernur DIY terkait Sinkronisasi Pergub No 92 Tahun 2020 tentang RAD Stunting dengan RAN PASTI
4. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 400.7.10 / 2697 tentang Penguatan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Instruksi Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 71 Tahun 2024 tentang RAD Kesehatan Jiwa
7. Rancangan Surat Edaran Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah
8. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 111/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Fasilitas Penyelenggaraan Haji DIY Tahun 1446H/2025M
9. Surat Keputusan Gubernur DIY No 116/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian *Zoonosis* dan Penyakit Infeksius Baru
10. *Policy Note* Pengembangan SMA Negeri 1 Seyegan sebagai Sekolah Berbasis *Sains*, Budaya, dan olahraga
11. *Policy Note* Studi Kelayakan Pendirian SMA Berbah

Di samping itu, terlaksananya kegiatan fasilitasi keagamaan yang terdiri dari:

1. Pembinaan Mental 5 Agama:
 - a. Islam: Pengajian Pejabat Aparat, Peringatan Hari Santri Nasional, Peringatan Isra' Mi'raj, Peringatan Maulud Nabi, Peringatan Nuzulul Qur'an.
 - b. Katolik: Perayaan Paskah
 - c. Kristen: Perayaan Paskah
 - d. Hindu: Perayaan Nyepi
 - e. Budha: Perayaan Waisak

2. Pelayanan Jamaah Haji: Seleksi PHD, Pembekalan/Pelatihan Petugas Haji, Pelepasan Jamaah Haji, Monitoring Keberangkatan Petugas dan Jamaah Haji, Penyambutan kepulangan jamaah haji.
3. Penyelenggaraan Festival Keagamaan: Utsawa Dharma Gita Daerah DIY, Pemberangkatan Kontingen Utsawa Dharmagita di Komplek Kepatihan, MTQ Daerah, Rakerda LPTQ, Pelatihan MTQ, Eksepsi dalam rangka pengiriman kontingen MTQ ke tingkat Nasional, MTQ Nasional di Samarinda.
4. Fasilitasi Peribadatan dan Lembaga Keagamaan: Sosialisasi Penyaluran Hibah Rumah Ibadah, Penyaluran Hibah 8 Lembaga Keagamaan, Survey Rumah Ibadah, Konsultasi Pemberkasan Hibah Rumah Ibadah, Pencairan dana hibah sebanyak 749 rumah ibadah, Terlaksananya Monitoring rumah ibadah yang sudah menerima hibah, Terlaksananya monev rumah ibadah oleh surveyor, Pembayaran Honorarium Surveyor, Laporan pertanggungjawaban hibah rumah ibadah dan lembaga keagamaan.

Tabel 2-2 Realisasi Anggaran TA. 2024

Tujuan/Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Rerata Capaian (%)
Tujuan	27.016.250.400	26.187.057.635	97
Terwujud nya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat			
Sasaran	26.222.458.400	25.692.849.418	98
Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama			
Meningkatnya Tatakelola	591.587.000	494.208.217	84

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah			
Total	27.016.250.400	26.187.057.635	97

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Spiritual Th 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian tujuan dan sasaran sebesar Rp27.016.250.400, terealisasi Rp26.187.057.635 atau 97% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp829.192.765 atau 3% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dalam SHBJ Daerah

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
SEKRETARIAT DAERAH										
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	100%
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	5 dokumen	11 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	4 rumusan	4 rumusan	100%	4 rumusan	4 rumusan	100%
		Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan	n/a	n/a	75%	100%	133.33%	100%	100%	100%
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	n/a	n/a	763 unit	749 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	n/a	n/a	13 lembaga	13 lembaga	100%	9 lembaga	9 lembaga	100%
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	n/a	n/a	10 dokumen	10 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	n/a	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rakyat Bidang Pendidikan	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan								
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	n/a	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	90.36	89,60	99.16%	90.58	90.58	100%
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	10 dokumen	10 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
4.01.01.1.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.01.1.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
4.01.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4.01.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
4.01.01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lpaoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	n/a	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
4.01.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
4.01.01.1.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	19 unit	19 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
4.01.01.1.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	51 unit	51 unit	100%	32 unit	32 unit	100%
4.01.01.1.0 9.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	24 unit	24 unit	100%	12 unit	12 unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis Urusan kesejahteraan rakyat. Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Kepala Biro;
2. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Biro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil, serta perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bina mental spiritual, fasilitasi kehidupan beragama, kesehatan, sosial, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta perpustakaan dan kearsipan;

- c. fasilitasi kehidupan beragama;
- d. pembinaan reformasi birokrasi Biro;
- e. penyusunan kebijakan proses bisnis Biro;
- f. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai.

Perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat diantaranya dilakukan dengan analisis yang mendalam pada peraturan-peraturan pusat yang relevan untuk diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, merencanakan strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mempercepat capaian target-target pembangunan yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat.

Upaya mensinergikan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi. Sinergitas pelaksanaan program kebijakan akan mampu mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu Biro Kesejahteraan Rakyat memanfaatkan sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY selain memiliki fungsi menyiapkan rumusan bahan kebijakan, juga memiliki fungsi untuk memfasilitasi pelayanan publik, yaitu fasilitasi kehidupan beragama dan Posbindu Satriya. Fasilitasi kehidupan beragama meliputi kegiatan pembinaan mental, pelayanan jamaah haji, penyelenggaraan festival keagamaan, serta fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan. Sedangkan Fasilitasi Posbindu Satriya dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan kepada pegawai di lingkungan Komplek Kepatihan melalui deteksi dini penyakit tidak menular.

Tabel 2-4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	-	-	n/a	n/a	67,5	80	90	n/a	n/a	160%	100%	100%	Capaian indikator sasaran tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perbedaan indikator yang ada pada dokumen acuan yang berbeda antara RPD DIY 2022-2026 dan RPJMD DIY 2022-2027.

*realisasi capaian di akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa sektor yang berada di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY diantaranya keagamaan, kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan dan kearsipan. Beberapa isu strategis yang dapat diuraikan terkait dengan sektor yang menjadi kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY antara lain:

1. Daftar antrian tunggu jamaah haji yang cukup lama sehingga rata-rata usia jamaah haji yang diberangkatkan semakin lanjut usia;
2. Belum optimalnya peran rumah ibadah sebagai sarana dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat yang baik;
3. Fasilitasi pemberdayaan Pesantren sebagai wahana pendidikan karakter bagi

- generasi muda belum dapat diwujudkan;
4. Dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi kelembagaan umat beragama dan aktivitas festival keagamaan kurang memadai;
 5. Penguatan dan penghargaan kepada kaum Rois sebagai panutan agama berbasis budaya belum dapat dilakukan tokoh agama yang berperan di masyarakat DIY;
 6. Ketimpangan kualitas layanan kesehatan antar wilayah Kab/Kota di DIY
 7. Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan yang memenuhi standar nasional;
 8. Prevalensi penyakit tidak menular melebihi rata-rata nasional ;
 9. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular;
 10. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting;
 11. Angka kasus kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi
 12. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi;
 13. Belum optimalnya literasi masalah kesehatan di masyarakat;
 14. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
 15. Ketimpangan antar wilayah kab/kota terkait HLS dan RLS;
 16. Belum maksimalnya sistem zonasi pendidikan karena ketimpangan kualitas/mutu di setiap daerah;
 17. Belum maksimal tata kelola pendidikan, relevansi minat bakat, serapan dunia kerja;
 18. Tingginya angka putus sekolah
 19. Belum optimalnya pelayanan sarana olahraga;
 20. Prestasi olahraga dalam kompetisi perlu terus ditingkatkan;
 21. Belum optimal pengembangan kapasitas kaum muda yang berperan dalam pembangunan;
 22. Perlu ditingkatkan wirausaha muda untuk mengembangkan potensi;
 23. Angka pengangguran di usia muda masih tinggi.
 24. Belum optimalnya upaya penggalian reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai

- budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur;
25. Belum optimal jumlah perpustakaan yang terakreditasi;
 26. Minat baca dan budaya literasi masih rendah;
 27. Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip belum sesuai dengan standar pengelolaan arsip;
 28. Pelaksanaan penyusutan berupa pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan arsip belum sesuai standar;
 29. Tingginya angka gelandangan dan pengemis di DIY;
 30. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak di DIY;
 31. Belum maksimalnya pengarusutamaan gender di DIY;
 32. Pemberdayaan masyarakat kalurahan/kelurahan yang belum optimal.

Isu-isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan isu sosial yang berdampak negatif sehingga dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat membutuhkan koordinator yang bertugas untuk memberikan arah dan strategi kebijakan di dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY selaku SKPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah diharapkan mampu untuk berperan sebagai koordinator utamanya dalam urusan kesejahteraan rakyat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2-5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.265.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.666.600	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.058.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.459.000	
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1.385.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1.385.600	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.822.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.822.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.778.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.778.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.663.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.663.000	
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.713.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.713.000	
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.402.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.402.000	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12.425.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		12.425.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.425.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.425.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		321.238.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.553.950	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.872.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.872.000	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.788.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.788.900	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.316.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.316.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.090.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.090.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.764.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.764.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	286.407.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165.723.050	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.900.000	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.900.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.390.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		165.194.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.592.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.592.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	92.054.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	96.054.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.340.000	Pemeliharaan Mebel	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.340.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	28.644.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	19.448.000	
4.01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	12.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12 Unit	12.760.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Dipelihara/Direhabilitasi			
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT										
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		12.709.859.300	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksaksananya a fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan		3.408.106000	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	125 unit	31.444.037.900	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	1 unit	225.000	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	8 lembaga	9.565.821.400	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	9 lembaga	3.407.881.000	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		379.033.900	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		352.252.900	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Dokumen	185.079.500	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	161.931.500	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	13 Dokumen	193.954.400	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	7 Dokumen	190.321.400	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		166.642.500	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		384.913.850	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	5 Dokumen	166.642.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	15 Dokumen	384.913.850	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN										
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	50.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	13 laporan	4.100.749.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22.08.5.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	1 laporan	50.000.000	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	13 laporan	4.100.749.000	
Total					13.858.532.700	Total				8.657.539.300	

Rancangan awal RKPD DIY Tahun 2025 sebesar Rp13.858.532.700, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini. Jumlah anggaran sesuai dengan analisis kebutuhan menjadi Rp8.657.539.300. Penyesuaian kebutuhan perlu dilakukan dengan tetap memaksimalkan proses perencanaan dan penganggaran agar penyelenggaraan tata pemerintahan dapat berjalan dengan optimal menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan beserta target capaiannya pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus terlampir pada tabel berikut

Tabel 2-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.22.8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan				
2.22.08.5.0 9	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Biro Kesejahteraan Rakyat		
2.22.08.5.0 9.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Biro Kesejahteraan Rakyat	13 laporan	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
4.01.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	4 Dokumen	
4.01.01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen	
4.01.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat	4 laporan	
4.01.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	
4.01.01.1.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	
4.01.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
		Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 laporan	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Paket	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Paket	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 unit	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Kesejahteraan Rakyat	5 Unit	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Biro Kesejahteraan Rakyat	6 unit	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro Kesejahteraan Rakyat	32 Unit	
4.01.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	12 unit	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	1 unit	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Biro Kesejahteraan Rakyat	9 lembaga	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Dokumen	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Catatan
4.01.04.1.0 2.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat	7 Dokumen	
4.01.04.1.0 3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat		
4.01.04.1.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Biro Kesejahteraan Rakyat	15 Dokumen	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan tahun 2026 mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat di RPJMD. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY menyusun rencana strategis tahun 2022-2027 untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis disusun dengan memperhatikan keselarasan RPJMD dengan prioritas nasional serta mencakup pembahasan mengenai isu strategis dan kebijakan nasional agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi yang baik antara kebijakan nasional dan daerah.

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat berpedoman pada Visi RPJMD DIY tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Adapun Biro Kesejahteraan Rakyat mendukung misi RPJMD 2022-2027 melalui misi kesatu yaitu Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan. Kontribusi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai leading sektor kebijakan strategis dalam mendukung misi kesatu meliputi peningkatan kualitas bahan kebijakan di bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar serta fasilitasi kehidupan beragama. Harapannya upaya penyelarasan program prioritas nasional dan daerah dapat mewujudkan pembangunan nasional yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan Biro Kesejahteraan rakyat Setda DIY didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan yang ditetapkan dalam koordinasi pembangunan bidang bina mental dan spiritual adalah **"Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat"**. Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY adalah :

1. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah,

Sasaran ini dicapai dengan indikator:

1. Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan
2. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran (%)				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	N/A	67,5	80	90	100
		Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	N/A	A 88.18	A 88.19	A 88.20	A 88. 21

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	13 laporan	4.100.749.000	Dais	14 Laporan	Rp 7.443.476.600
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	13 laporan	4.100.749.000	Dais	14 Laporan	Rp 7.443.476.600
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksaksananya fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	2 Dokumen	3.408.106.000	APBD	2 dokumen	Rp 16.805.719.400
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Tempat Ibadah yang Difasilitasi	1 unit	225.000	APBD	500 unit	Rp 12.600.989.200

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	9 lembaga	3.407.881.000	APBD	8 Lembaga	Rp 4.204.730.200
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9 dokumen	352.252.900	APBD	12 dokumen	Rp 783.854.800
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	161.931.500	APBD	3 Dokumen	Rp 502.000.000
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	7 Dokumen	190.321.400	APBD	6 Dokumen	Rp 196.756.400
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	n/a	n/a	APBD	3 Dokumen	Rp 85.098.400
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	15 dokumen	384.913.850	APBD	6 dokumen	Rp 319.295.200
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	15 Dokumen	384.913.850	APBD	3 Dokumen	Rp 64.000.000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	n/a	n/a	APBD	3 Dokumen	Rp 255.295.200
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	10.666.600	APBD	12 dokumen	Rp 10.666.600
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.459.000	APBD	4 Dokumen	Rp 7.459.000
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1.385.600	APBD	4 Dokumen	Rp 1.385.600
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.822.000	APBD	4 Laporan	Rp 1.822.000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.778.000	APBD	3 dokumen	Rp 13.778.000
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8.663.000	APBD	1 Dokumen	Rp 8.663.000
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.713.000	APBD	1 Laporan	Rp 2.713.000
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	2.402.000	APBD	1 Laporan	Rp 2.402.000
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	12.425.000	APBD	1 dokumen	Rp 12.425.000
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.425.000	APBD	1 laporan	Rp 12.425.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 dokumen	200.553.950	APBD	6 dokumen	Rp 262.116.930

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.872.000	APBD	1 Paket	Rp 4.610.000
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.788.900	APBD	1 Paket	Rp 14.451.900
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.316.000	APBD	1 Paket	Rp 2.628.000
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.090.000	APBD	2 Paket	Rp 15.090.000
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.764.000	APBD	1 Dokumen	Rp 1.764.000
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	165.723.050	APBD	1 Laporan	Rp 223.573.030
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	165.723.050	APBD	2 dokumen	Rp 8.900.000
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	APBD	1 Laporan	Rp 5.000.000
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	3.900.000	APBD	1 Laporan	Rp 3.900.000

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2025		Sumber Dana	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	165.194.000	APBD	5 dokumen	Rp 174.928.000
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.592.000	APBD	1 Unit	Rp 34.592.000
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	96.054.000	APBD	5 Unit	Rp 96.054.000
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.340.000	APBD	6 Unit	Rp 2.340.000
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	19.448.000	APBD	32 Unit	Rp 29.182.000
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12.760.000	APBD	12 Unit	Rp 12.760.000
Total			8.657.539.300			25,835,160,530	

Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 merencanakan anggaran sebesar 8.657.539.300 sedangkan tahun 2026 merencanakan anggaran sebesar 25,835,160,530. Pada tahun 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Perencanaan anggaran tahun 2025 dan 2026 bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan mengikuti dinamika dan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2025, Biro Bina Mental Spiritual melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Program Kesejahteraan rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dibiayai oleh dana keistimewaan. Terlampir rencana kerja dan target kinerja tahun 2025 yang akan dilaksanakan Biro Bina Mental Spiritual untuk mendukung tercapaian sasaran dan program.

Tabel 4-1 Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
				2025
1	Terwujudnya bahan rumusan kebijakan strategis yang mendukung pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan rakyat	Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, bidang pelayanan dasar dan bidang non pelayanan dasar yang menjadi naskah bahan kebijakan dan fasilitasi keagamaan	80
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A (88.19)

BAB 5 PENUTUP

Pada tahun 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 26 subkegiatan. Program tersebut terdiri dari Program Kesejahteraan Rakyat dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang didanai APBD, serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang didanai oleh dana keistimewaan. Rencana kerja tahun 2025 memuat isu strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar bidang non pelayanan dasar. Optimalisasi perumusan kebijakan dilakukan melalui penyusunan *roadmap* analisa kebijakan yang mengacu pada isu strategis yang sedang berkembang. Keberhasilan perumusan kebijakan tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama antar sektor untuk mewujudkan pembangunan yang sinergis, adil dan berkelanjutan.

Harapannya, ketersediaan dokumen rencana kerja 2025 dapat dijadikan landasan untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam optimalisasi perumusan kebijakan terkait bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia. Di samping itu, rencana kerja diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, ketersediaan dan kebutuhan akan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat pada satu tahun mendatang.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

Komplek Kepatihan Unit 8, Suryatmajan, Danurejan
Daerah Istimewa Yogyakarta